



**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**SKRIPSI**

**PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS  
DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN LABA**

**FENI LIZARTI  
07 153 100**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi*

**PADANG**

**2012**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiv</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan .....	10
 <b>BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS</b>	
2.1 Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ) .....	12
2.2 Manajemen laba ( <i>Earning Management</i> ).....	16

2.2.1 Pengertian Manajemen Laba .....	16
2.2.2 Motivasi Manajemen Laba .....	18
2.2.3 Pola Manajemen Laba .....	21
2.3 Dewan Komisaris.....	25
2.3.1 Pengertian Dewan Komisaris .....	25
2.3.2 Ukuran Dewan Komisaris dan Manajemen Laba .....	28
2.3.3 Komposisi Dewan Komisaris dan Manajemen Laba.....	30
2.4 Komite Audit dan Manajemen Laba .....	32
2.5 Ukuran Perusahaan dan Manajemen Laba .....	34
2.6 Studi Penelitian Terdahulu.....	35
2.7 Kerangka Pemikiran .....	37
2.8 Rumusan Hipotesis.....	40
2.9 Matriks Penelitian Terdahulu.....	41
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Desain Penelitian .....	44
3.2 Populasi, Target Populasi, dan Metode Pengambilan Sampel .....	44
3.3 Variabel Penelitian .....	46
3.4 Definisi Operasional .....	48

3.5 Sumber Data .....	50
3.6 Teknik Analisis Data .....	50
3.6.1 Statistik Deskriptif .....	50
3.6.2 Uji Asumsi Klasik.....	51
3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda.....	52

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Umum Perusahaan Sampel.....	56
4.2 Statistik Deskriptif Hasil Penelitian .....	57
4.3 Uji Asumsi Klasik .....	60
4.3.1 Uji Normalitas.....	60
4.3.2 Uji Multikolinearitas.....	61
4.3.3 Uji Heterokedastisitas .....	62
4.3.4 Uji Autokorelasi.....	62
4.4 Hasil Pengujian Hipotesis .....	64
4.4.1 Uji Parsial (Uji T) .....	64
4.4.1.1 Ukuran Dewan Komisaris.....	65
4.4.1.2 Komposisi Dewan Komisaris .....	67
4.4.1.3 Komposisi Komite Audit.....	68

4.4.1.4 Ukuran Perusahaan.....	69
4.4.2 Uji Variabel Secara Bersama (Uji F).....	70
4.4.3 Analisis Korelasi Ganda (R) dan Determinasi (R <sup>2</sup> ).....	72
4.5 Matriks Hasil Penelitian .....	74
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	76
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	77
5.4 Saran untuk Penelitian Selanjutnya .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>xv</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>79</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap perusahaan menyiapkan laporan keuangan secara periodik untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan diartikan sebagai:

Suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (PSAK No. 1 Revisi 2009).

Laporan keuangan memuat informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, serta perubahan posisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan, yang merupakan produk dari proses akuntansi, dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh beberapa pihak internal maupun pihak eksternal. Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi utama akuntansi yaitu sebagai penyedia laporan-laporan periodik untuk manajemen, investor, kreditur, dan pihak-pihak lain diluar perusahaan sehingga laporan keuangan yang disajikan harus benar-benar mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya (Wijayanti, 2009 dalam Puspaningsih, 2010). Oleh karena itu laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi akuntansi yang paling mendasar bagi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh investor pasar modal.

Dalam laporan keuangan, salah satu parameter untuk mengukur kinerja perusahaan yang sering digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan adalah laba yang dihasilkan perusahaan (Siregar dan Utama, 2005). Informasi tentang komponen laba penting dan dapat digunakan untuk memprediksi laba dan arus kas masa depan serta memberi nilai ekonomi (Stice et al, 2004:228). Ukuran kinerja akuntansi tradisional menggunakan angka laba sebagai

pengukur kinerja. Pengukuran kinerja dengan angka laba ini menarik karena mudah digunakan dan dipahami, diukur berdasarkan praktek akuntansi standar, serta menunjukkan potensi perusahaan dalam menghasilkan arus kas sepanjang waktu (Brigham dan Houston, 1998:28).

Penelitian Healy (1985) dalam Stice et al (2004) menyatakan bahwa perhitungan bonus internal yang berdasarkan atas jumlah laba yang dihasilkan turut menjadi motivasi manajer dalam melakukan manajemen laba. Hal ini membuat manajer seringkali berperilaku seiring dengan bonus yang akan diberikan. Jika bonus yang diberikan tergantung pada laba yang akan dihasilkan, maka manajer akan melakukan *creative accounting* dengan menaikkan laba atau mengurangi laba yang akan dilaporkan.

Pemilik biasanya menetapkan batas bawah laba yang paling minim agar mendapatkan bonus. Dari pola bonus ini manajer akan menaikkan labanya hingga ke atas batas minimal tadi. Tetapi jika pemilik perusahaan membuat batas atas untuk mendapatkan bonus, maka manajer akan berusaha mengurangi laba sampai batas atas tadi dan mentransfer laba saat ini ke periode yang akan datang. Hal ini dilakukan oleh manajer karena jika laba melewati batas atas tersebut manajer sudah tidak mendapatkan insentif tambahan atas upayanya memperoleh laba di atas batas yang ditetapkan oleh pemilik perusahaan. Jumlah laba juga dijadikan indikator penting untuk menentukan nilai saham yang akan mempengaruhi keputusan investor apakah akan membeli, menjual, atau tetap akan mempertahankan investasinya.

Berdasarkan keterangan di atas, informasi laba sebagai bagian dari laporan keuangan, sering menjadi target rekayasa melalui tindakan oportunistis manajemen untuk memaksimalkan keuntungannya, tetapi dapat merugikan pemegang saham atau investor. Tindakan oportunistis tersebut dilakukan dengan cara memilih kebijakan akuntansi tertentu, sehingga laba perusahaan

dapat diatur, dinaikkan atau diturunkan sesuai dengan keinginannya, yang disebut dengan istilah *management laba (earnings management)* (Puspaningsih, 2010).

Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia pun memberi keleluasaan kepada perusahaan untuk memilih metode atau kebijakan akuntansi yang akan digunakan dalam penyusunan laporan keuangan (Veronica dan Bachtiar, 2003). Hal ini seperti yang diatur dalam PSAK No. 14 Revisi 2008 tentang persediaan, dan PSAK No. 16 Revisi 2007 tentang penyusutan. PSAK No. 14 memberikan pilihan untuk menggunakan metode FIFO (*first in first out*) atau metode rata-rata tertimbang (*average*) untuk menghitung biaya persediaan. PSAK No. 16 juga memberikan beberapa pilihan metode untuk menghitung penyusutan. Ada tiga metode penyusutan yang disebutkan dalam PSAK No. 16, yaitu metode garis lurus (*straight line method*), metode saldo menurun (*diminishing balance method*), dan metode jumlah unit (*sum of the unit method*). Fleksibilitas dalam pemilihan metode akuntansi akan berpengaruh terhadap angka-angka dalam laporan keuangan. Penerapan metode akuntansi yang berbeda akan menghasilkan angka yang berbeda pula dalam laporan keuangan (Anonim, 2011).

Timbulnya *earning management* ini dapat dijelaskan dengan teori keagenan. Teori keagenan menjelaskan hubungan antara manajer (*agent*) dan pemilik (*principal*). Dalam teori keagenan (*agency theory*), hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). *Agent* bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan pemilik dengan cara memaksimalkan laba, sehingga *return* atau dividen yang didapatkan oleh pemilik juga akan besar. Laba yang tinggi dapat membuat *agent* memperoleh bonus yang besar, dan juga menjadi jaminan bagi *agent* untuk terus dipekerjakan oleh pemilik (Wedari, 2004). Karena itu, manajer atau *agent* melakukan

praktek manajemen laba yang dapat mengatur jumlah laba yang ditampilkan dalam laporan keuangan.

Terjadinya manajemen laba diakibatkan juga oleh adanya asimetri informasi atau kesenjangan informasi antara manajer dan pemilik (Richardson, 1998). Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Akan tetapi informasi yang disampaikan terkadang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya (Haris, 2004 dalam Ujiyantho dan Pramuka, 2007).

Tindakan *earnings management* telah memunculkan beberapa kasus skandal pelaporan akuntansi yang secara luas diketahui, antara lain Enron, Merck, World Com dan mayoritas perusahaan lain di Amerika Serikat (Cornett et al, 2006). AAER (*Accounting and Auditing Enforcement Releases*), suatu divisi di SEC (*Security and Exchange Commision*), pada tahun 2000 dalam Mulford dan Comiskey (2010), menerbitkan laporan tentang beberapa kasus manajemen laba, antara lain sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Kasus-kasus manajemen laba di luar Indonesia**

<b>No.</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>Kasus Manajemen Laba</b>
1.	Intile Design, Inc. AAER No. 1259, May 23,	Menilai terlalu rendah persediaan akhir agar pajak properti mengecil.

	2000.	
2.	System Software Associates, Inc. AAER No. 1285, July 14, 2000.	Mengakui pendapatan atas pendapatan yang tidak jelas apakah produk yang dikirim telah diterima pelanggan atau belum.
3.	ABS Industries, Inc. AAER No. 1240, Mar 23, 2000.	Membukukan penjualan tanpa adanya pesanan dari pelanggan, bahkan pada beberapa kasus produk belum selesai dibuat.
4.	Sirena Apparel, Inc. AAER No. 1673, Sept 27, 2000.	Tidak menutup pembukuan di kuartal Maret 1999 agar target penjualan periode tersebut tercapai dengan cara mengubah tanggal pada computer agar tanggal palsu tercetak di faktur.
5.	Guilford Mills, Inc. AAER No. 1287, Mar 23, 2000.	Melakukan pembukuan palsu ke Buku Besar Hofman Laces (anak perusahaan) yang mengurangi utang dagang dan harga pokok penjualan dengan jumlah yang sama sehingga menaikkan laba

Sumber: Yulianto (2011)

Sedangkan di Indonesia sendiri, kasus-kasus yang terjadi dijabarkan dalam Tabel 1.2.

Kasus-kasus manajemen laba yang telah dijabarkan dalam tabel di atas merupakan tindakan kecurangan yang dilakukan manajemen, yang dapat merugikan investor, kreditur, serta pihak lain yang menggunakan informasi dalam laporan keuangan. Investor dan kreditur sebagai sumber dana eksternal yang penting dalam sistem korporasi modern, perlu dilindungi dari tindak kecurangan yang dilakukan manajemen.

**Tabel 1.2**  
**Kasus-kasus manajemen laba di Indonesia**

No	Perusahaan / Tahun	Kasus Manajemen Laba
1	PT Kimia Farma Tbk.	Terdapat kesalahan penyajian dalam laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk.,

	/ 2002	berupa kesalahan dalam penilaian persediaan barang jadi dan kesalahan pencatatan penjualan, dimana dampak kesalahan tersebut mengakibatkan <i>overstated</i> laba pada laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2001 sebesar Rp32,7 miliar (Yulianto, 2011).
2	PT Indofarma Tbk. / 2004	Nilai barang dalam proses dinilai lebih tinggi dari nilai yang seharusnya dalam penyajian nilai persediaan barang dalam proses pada tahun buku 2001 sebesar Rp28,87 miliar. Akibatnya penyajian terlalu tinggi ( <i>overstated</i> ) persediaan sebesar Rp28,87 miliar, harga pokok penjualan disajikan terlalu rendah ( <i>understated</i> ) sebesar Rp28,8 miliar dan laba bersih disajikan terlalu tinggi <i>overstated</i> dengan nilai yang sama (Yulianto, 2011).
3	PT Indosat / 2003 & 2004	Manajemen Indosat membuat kesalahan dengan melakukan 17 transaksi derivatif yang terjadi selama tahun 2003 dan 2004. Perusahaan yang awalnya dilaporkan memperoleh laba, namun setelah diaudit ternyata mengalami kerugian yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp 323 milyar, dan potensi kehilangan penerimaan dari dividen sebesar Rp 62 milyar (Koran Tempo, 2008 dalam Sari, 2009).
4	PT Kereta Api / 2005	Perusahaan yang sebenarnya merugi dilaporkan memperoleh keuntungan.

		Manipulasi dilakukan dengan cara sejumlah pos yang seharusnya dinyatakan sebagai beban, tapi masih dinyatakan sebagai aset perusahaan (Antara News, 2006).
--	--	--

Sumber: Yulianto (2011), Sari (2009), dan Antara News (2006)

Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu pengawasan terhadap manajemen di perusahaan. Pengawasan ini sangat penting karena kasus-kasus besar manajemen laba seperti kasus Enron dan Worldcom terbukti melibatkan manajemen perusahaan pada tingkat tertinggi (Muntoro, 2006). Pengawasan terhadap manajemen atau direksi pada perusahaan merupakan tugas dari dewan komisaris. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT).

Pasal 1 Undang-undang ini menyebutkan bahwa organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. RUPS memiliki wewenang tertinggi. Direksi memiliki tanggung jawab secara penuh terhadap pengurusan perusahaan. Sementara Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas untuk melakukan pengawasan sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Jelaslah bahwa Dewan Komisaris memegang peranan penting dalam struktur organisasi sebuah perusahaan.

Menurut Egon Zehnder (2000) dalam FCGI (2003) dewan komisaris yang bertugas untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas, merupakan inti dari konsep *good corporate governance* (GCG). Pada pelaksanaan GCG, tugas dewan komisaris dilakukan melalui komite-komite seperti komite audit, komite remunerasi, komite manajemen risiko, dan komite-

komite lainnya. Dewan komisaris beserta komite-komitanya diharapkan mampu meminimalisasi tindak kecurangan seperti manajemen laba (Muntoro, 2006).

Terjadinya kasus-kasus manajemen laba di Indonesia dan luar negeri membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang penerapan mekanisme *good corporate governance* dan hubungannya dengan manajemen laba. Adapun judul dari penelitian ini adalah “**Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba**”.

Penelitian ini juga dimotivasi oleh penelitian Nasution dan Setiawan (2007) yang menghasilkan kesimpulan yang berbeda dengan penelitian Ujiyantho dan Pramuka (2007) untuk variabel ukuran dewan komisaris. Nasution dan Setiawan (2007) menemukan adanya hubungan yang positif antara manajemen laba dan ukuran dewan komisaris. Semakin kecil ukuran dewan komisaris, maka semakin efektif peran dan fungsinya. Sehingga semakin kecil pula kemungkinan terjadinya manajemen laba. Sedangkan Ujiyantho dan Pramuka (2007) memperoleh hasil bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang menguji pengaruh variabel independen (ukuran dewan komisaris, komposisi komisaris independen, komposisi komite audit, dan ukuran perusahaan) terhadap variabel dependen (manajemen laba yang diproksikan dengan *discretionary accruals / DA*) baik secara simultan maupun secara parsial. Perbedaannya terletak pada sampel dan periode penelitian. Penelitian dilakukan terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dalam periode 2007-2010.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba di perusahaan manufaktur yang listing di BEI tahun 2007-2010;

2. Bagaimana pengaruh komposisi komisaris independen terhadap manajemen laba di perusahaan manufaktur yang listing di BEI tahun 2007-2010;
3. Bagaimana pengaruh komposisi komite audit terhadap manajemen laba di perusahaan manufaktur yang listing di BEI tahun 2007-2010;
4. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba di perusahaan manufaktur yang listing di BEI tahun 2007-2010.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yang dapat dinyatakan sebagai berikut ini :

1. Memperoleh bukti empiris tentang pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba di perusahaan manufaktur yang listing di BEI.
2. Memperoleh bukti empiris tentang pengaruh komposisi komisaris independen terhadap manajemen laba di perusahaan manufaktur yang listing di BEI.
3. Memperoleh bukti empiris tentang pengaruh komposisi komite audit terhadap manajemen laba di perusahaan manufaktur yang listing di BEI.
4. Memperoleh bukti empiris tentang pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba di perusahaan manufaktur yang listing di BEI.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

## 1. Bagi penulis

Penelitian ini hendaknya dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang penerapan *good corporate governance* di perusahaan dan pengaruhnya terhadap praktik manajemen laba.

## 2. Bagi penelitian berikutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya terutama penelitian yang terkait dengan *good corporate governance* maupun praktik manajemen laba.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang tersusun secara sistematis. Adapun masing-masing babnya secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memberikan uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

#### **BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

Bab ini merupakan uraian landasan teoritik terhadap masalah yang terkait dengan penulisan ini, antara lain tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), dan manajemen laba.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang populasi dan penentuan sampel penelitian, sumber data dan teknik pengambilan sampel, definisi dan pengukuran variabel penelitian, dan metode analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan hasil perhitungan data sesuai dengan teori yang digunakan serta analisa dan hasil penelitian.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan, dan implikasi serta saran terhadap penelitian ini.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

Manajemen laba, seperti telah diungkapkan sebelumnya, berdasar kepada teori keagenan (*agency theory*). Manajemen laba juga dimungkinkan terjadinya karena sebuah keadaan yang merupakan implikasi dari teori keagenan, yaitu asimetri informasi. Manajemen laba dapat menyebabkan kerugian yang besar pada para pemegang saham dan pemberi kredit, seperti yang telah terjadi pada kasus Enron dan WorldCom.

Konsep GCG diusung sebagai salah satu solusi dalam mengatasi manajemen laba. Konsep transparansi, keterbukaan, dan tanggung jawab yang mendasari GCG, diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan bagi pemegang saham dan pemberi pinjaman terhadap tindakan manajemen laba yang merugikan. Namun, penelitian ini tidak membahas GCG secara keseluruhan. Penelitian ini hanya memfokuskan pada dua unsur yang memegang peranan penting dalam penerapan GCG, yaitu dewan komisaris dan komite audit. Berikut akan dijelaskan tentang teori keagenan, motivasi dan teknik manajemen laba, serta penjelasan tentang dewan komisaris dan komite audit di perusahaan.

#### **2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara satu atau lebih individu yang disebut pemilik (*principals*) yang mempekerjakan individu lain (*agent*) untuk melakukan pekerjaan dan kemudian mendelegasikan otorisasi pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut. Berdasarkan konteks manajemen keuangan,

hubungan agen yang utama adalah antara pemegang saham (investor) dan manajer serta antara manajer dan pemberi kredit (kreditor).

Masalah keagenan (*agency problem*) dapat muncul ketika *principals* kesulitan untuk memastikan bahwa *agent* bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan *principals* (Wedari, 2004). Terkait dengan hipotesis dari *positive accounting theory*, perilaku oportunistik *agent* seringkali terlihat saat *agent* memilih kebijakan akuntansi yang sesuai dengan kepentingan mereka, meskipun kebijakan tersebut bukan yang terbaik bagi *principals* (Sugiarto, 2009).

Teori keagenan memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Pihak *principals* termotivasi mengadakan kontrak untuk mensejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. *Agent* termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologinya, antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi (Ma'ruf, 2006).

Eisenberg (1998) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu:

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*).
2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*).
3. Manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*).

Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia akan bertindak *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya (Haris, 2004 dalam Ujiyantho dan Pramuka, 2007).

Masalah keagenan dapat muncul dalam berbagai tipe, yaitu konflik antara manajer dan pemegang saham, konflik antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, dan konflik antara pemegang saham/manajer dengan pemberi pinjaman (Sugiarto, 2009). Masalah keagenan tipe pertama umumnya ditemukan pada perusahaan-perusahaan besar yang dikelola oleh manajer profesional dan pemiliknya adalah beratus investor dengan kepemilikan yang relatif kecil. Masalah terjadi ketika *agent* (tim manajemen) memiliki kepentingan pribadi yang sebagian besar bertentangan dengan kepentingan pemilik perusahaan (*principals*), sehingga upaya memaksimalkan nilai perusahaan tidak selalu terpenuhi.

Masalah tipe kedua diungkapkan Sugiarto (2009) seperti pengambilalihan hak-hak investor kecil oleh pemegang saham yang memiliki kontrol yang besar. Sementara masalah ketiga, yaitu konflik antara pemegang saham dan pemberi pinjaman, disebabkan oleh perbedaan sikap antara dua pihak (Choi, 1992 dalam Sugiarto, 2009). Pemberi pinjaman selalu berharap agar bisnis perusahaan berjalan aman sehingga uang yang dipinjamkan dapat kembali, namun pemegang saham bisa saja memilih bisnis yang berisiko tinggi dengan harapan memperoleh *return* yang lebih tinggi.

Hal lain yang dapat menyebabkan timbulnya masalah keagenan selain yang disebutkan adalah adanya kesenjangan informasi antara *principals* dan *agent* yang biasa disebut dengan asimetri informasi (*information asymmetry*). Asimetri informasi adalah ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh *principals* dan *agent*. Ketika *principals* tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja *agent*, sementara *agent* memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan (Widyaningdyah, 2001 dalam Ningsaptiti, 2010). Asimetri antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principals*) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (*earnings*

*management*) dalam rangka menyesatkan pemilik (pemegang saham) mengenai kinerja ekonomi perusahaan (Ujiyantho dan Pramuka, 2007).

Jensen dan Meckling (1976) mengidentifikasi dua cara untuk mengatasi masalah ini, yaitu investor luar melakukan pengawasan (*monitoring*) dan manajer sendiri melakukan pembatasan–pembatasan atas tindakan–tindakannya (*bonding*). Pada satu sisi, kedua kegiatan tersebut akan mengurangi kesempatan penyimpangan oleh manajer sehingga nilai perusahaan akan meningkat sedangkan pada sisi yang lain keduanya akan memunculkan biaya sehingga akan mengurangi nilai perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa calon investor akan mengantisipasi adanya kedua biaya tersebut ditambah dengan kerugian yang masih muncul meskipun sudah ada *monitoring* dan *bonding*, yang disebut *residual cost*. Antisipasi atas ketiga biaya yang didefinisikan sebagai biaya agensi ini nampak pada harga saham yang terdiskon saat perusahaan menjual sahamnya.

Masalah keagenan dan *corporate governance* merupakan dua hal yang memiliki keterkaitan (Arifin dan Rachmawati, 2006). Masalah keagenan dalam konteks perusahaan dapat muncul antara pihak-pihak yang terlibat dan memiliki kepentingan terhadap perusahaan tersebut, seperti manajemen, pemegang saham, dan pemberi pinjaman (Sugiarto, 2009). *Corporate governance* adalah sebuah konsep yang mengatur hubungan antara manajemen dan pemegang saham (Arifin dan Rachmawati, 2006).

Shleifer dan Vishny (1997) menyatakan bahwa *corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, dan berkaitan dengan bagaimana para investor dapat mengawasi dan mengontrol manajemen. Penerapan *corporate governance* yang benar-benar berdasarkan prinsip transparansi,

keterbukaan, dan pertanggungjawaban diharapkan dapat mengurangi keagenan (Arifin dan Rachmawati, 2006).

## **2.2 Manajemen Laba (*Earnings Management*)**

### **2.2.1 Pengertian Manajemen Laba (*Earnings Management*)**

Schipper (1989) menyatakan manajemen laba merupakan suatu pengungkapan manajemen sebagai intervensi langsung manajemen dalam proses pelaporan keuangan melalui pengolahan pendapatan atau keuntungan, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat tertentu, baik bagi manajer maupun perusahaan yang dilandasi oleh faktor-faktor ekonomi. Menurut Healy dan Wahlen (1999) dalam Andayani (2010), manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan pertimbangan (*judgment*) dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk merubah laporan keuangan. Tindakan ini bertujuan untuk memanipulasi besaran (*magnitude*) laba kepada beberapa *stakeholders* tentang kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil perjanjian (kontrak) yang tergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan.

Sugiri (1998) membagi definisi manajemen laba menjadi:

#### a. Definisi sempit

Manajemen laba berkaitan dengan pemilihan metode akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Tindakan ini dapat diartikan juga sebagai perilaku manajer untuk “bermain” dengan komponen *discretionary accruals* dalam menentukan besarnya laba.

#### b. Definisi luas

Manajemen laba merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan atau mengurangi laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit yang merupakan tanggungjawab manajer, tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomis jangka panjang unit tersebut.

Manajemen laba merupakan pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajemen dari standar akuntansi yang ada dan secara alamiah dapat memaksimalkan utilitas mereka dan atau nilai pasar perusahaan. Pemahaman atas manajemen laba dapat dibagi menjadi dua cara pandang. Pertama, manajemen laba dipandang sebagai perilaku *opportunistic* manajer untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak hutang, dan *political cost*. Kedua, manajemen laba dipandang dari perspektif *efficient contracting*. Perspektif ini menggambarkan bahwa manajemen laba memberikan kepada manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak (Halim dkk, 2005 dalam Andayani, 2010).

Kesimpulan dari beberapa pengertian di atas adalah bahwa manajemen laba merupakan intervensi yang disengaja oleh manajemen dalam proses pelaporan keuangan perusahaan kepada pihak eksternal perusahaan. Intervensi ini memanfaatkan penilaian (*judgement*) mereka untuk mempengaruhi keputusan para penggunanya serta demi memperoleh keuntungan pribadi (Purnomo dan Pratiwi, 2009).

### **2.2.2 Motivasi Manajemen Laba**

Angka-angka pada laporan keuangan memiliki kekuatan untuk membangun opini di lingkungan perusahaan. Laba bersih merupakan angka yang memperoleh perhatian paling banyak, sehingga angka ini memiliki kemungkinan terbesar untuk dimanipulasi oleh manajer (Stice et al, 2004:420). Hal-hal yang dapat digolongkan sebagai motivasi manajemen laba dinyatakan Stice et al (2004:420-426) sebagai berikut:

1. Memenuhi target internal

Target laba internal merupakan alat penting dalam memotivasi para manajer untuk meningkatkan usaha penjualan, pengendalian biaya, dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Tetapi, seperti alat pengukuran kinerja yang lain, fakta yang sering terjadi adalah orang yang diukur kinerjanya cenderung melupakan faktor-faktor yang mendasari pengukuran tersebut dan mengalihkan fokus perhatian hanya kepada angka-angka yang diukur.

Salah satu contoh yang pernah terjadi adalah pada kasus *Xerox* Meksiko yang terungkap pada tahun 2002. Ketatnya persaingan dari para produsen mesin foto kopi pada tahun 1990-an, membuat manajer *Xerox* merasakan tekanan dari target laba dan pendapatan perusahaan. Hal ini membuat manajer *Xerox* memperlonggar standar kredit, membuat estimasi piutang tak tertagih yang bias, dan pada akhirnya menggelapkan retur penjualan.

2. Memenuhi harapan eksternal

Pihak-pihak eksternal perusahaan seperti pemegang saham dan pemberi pinjaman, serta pemasok dan pelanggan mempunyai kepentingan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Bagi pihak-pihak tersebut, tanda-tanda dari kelemahan keuangan, seperti pelaporan rugi, benar-benar merupakan suatu berita buruk. Oleh karena itu, di

beberapa perusahaan yang menunjukkan indikasi adanya kerugian, para akuntan diminta untuk mempertimbangkan kembali penilaian mereka atas akrual dan estimasi guna memperoleh angka laba positif di laporan keuangan.

Selain yang telah disebutkan di atas, pihak eksternal lain yang turut berpengaruh terhadap angka laporan keuangan adalah para analis. Para analis bertugas untuk memberikan rekomendasi untuk menjual dan membeli saham sebuah perusahaan. Selain itu, mereka juga mengeluarkan estimasi atas laba perusahaan di masa yang akan datang. Penelitian telah menunjukkan bahwa pelaporan laba yang lebih kecil dibandingkan dengan estimasi laba yang dikeluarkan para analis, akan menyebabkan turunnya harga saham. Kemampuan perusahaan untuk secara konsisten memenuhi target para analis, menjadi tidak mungkin jika perusahaan tidak melakukan paling tidak satu jenis manajemen laba.

### 3. Meratakan atau memuluskan laba (*income smoothing*)

Menahan atau mempercepat pengakuan terhadap beberapa jenis pendapatan dan beban, serta melaporkan angka laba yang dilaporkan dari tahun ke tahun berikutnya, secara akuntansi disebut meratakan atau memuluskan laba (*income smoothing*). Praktek ini terbukti berhasil dilakukan oleh General Electric (GE), dengan melaporkan kenaikan laba secara terus-menerus. Struktur usaha GE pada dasarnya memang cocok untuk manajemen laba karena luasnya unit operasi perusahaan (jasa keuangan, produsen alat berat, peralatan rumah tangga, dan lain-lain). Namun, praktek *income smoothing* yang dilakukan GE masih dalam lingkup aturan akuntansi yang berlaku.

4. Mendandani angka laporan keuangan (*window dressing*) untuk penjualan saham perdana (IPO) atau memperoleh pinjaman.

Banyak studi yang telah menunjukkan kecenderungan para manajer di perusahaan di AS untuk menggelembungkan laba yang dilaporkan dengan cara menggunakan asumsi-asumsi akuntansi di periode sebelum penjualan saham perdana (IPO).

Sementara Scott (2000: 302) mengemukakan motivasi terjadinya manajemen laba sebagai berikut:

- a. *Bonus Purposes*

Manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan akan bertindak secara *opportunistic* untuk melakukan manajemen laba dengan memaksimalkan laba saat ini. Laba yang semakin tinggi, juga akan meningkatkan jumlah bonus manajer. Bonus hipotesis ini pertama kali dinyatakan oleh Healy(1985).

- b. *Political Motivations*

Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada perusahaan publik. Perusahaan cenderung mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan yang lebih ketat.

- c. *Taxation Motivations*

Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang paling nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan dengan tujuan penghematan pajak pendapatan.

- d. Pergantian *CEO*

CEO yang mendekati masa pensiun akan cenderung menaikkan pendapatan untuk meningkatkan bonus mereka. Dan jika kinerja perusahaan buruk, mereka akan memaksimalkan pendapatan agar tidak diberhentikan.

e. *Initial Public Offering (IPO)*

Perusahaan yang akan *go public* belum memiliki nilai pasar, dan menyebabkan manajer perusahaan yang akan *go public* melakukan manajemen laba dalam prospektus mereka dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan.

f. Pentingnya Memberi Informasi Kepada Investor

Informasi mengenai kinerja perusahaan harus disampaikan kepada investor sehingga pelaporan laba perlu disajikan agar investor tetap menilai bahwa perusahaan tersebut dalam kinerja yang baik.

### 2.2.3 Pola Manajemen Laba

Menurut Scott (2000), terdapat empat pola manajemen laba yaitu:

1. *Taking a bath*

*Taking a bath* adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba perusahaan pada periode berjalan menjadi sangat ekstrim rendah (bahkan rugi) atau sangat ekstrim tinggi dibandingkan dengan laba

pada periode sebelumnya atau sesudahnya. *Taking a bath* terjadi selama periode adanya tekanan organisasi atau pada saat terjadinya reorganisasi, seperti pergantian CEO baru.

Teknik *taking a bath* mengakui adanya biaya-biaya pada periode yang akan datang dan kerugian pada periode berjalan ketika terjadi keadaan buruk yang tidak menguntungkan dan tidak bisa dihindari pada periode berjalan.

Konsekuensinya, manajemen menghapus beberapa aktiva, membebankan perkiraan-perkiraan biaya mendatang. Akibatnya laba pada periode berikutnya akan lebih tinggi dari seharusnya.

## 2. *Income minimization*

*Income minimization* adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba pada laporan keuangan periode berjalan lebih rendah daripada laba sesungguhnya. *Income minimization* biasanya dilakukan pada saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi dengan maksud agar tidak mendapat perhatian secara politis. Kebijakan yang diambil dapat berupa penghapusan atas barang modal dan aktiva tak berwujud, pembebanan pengeluaran iklan, pengeluaran R&D, dan lain-lain.

## 3. *Income maximization*

Maksimisasi laba (*income maximization*) adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba pada laporan keuangan periode berjalan lebih tinggi daripada laba sesungguhnya. *Income maximization* dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bonus yang lebih besar, meningkatkan keuntungan, dan untuk menghindari dari pelanggaran atas kontrak hutang jangka panjang. *Income maximization* dilakukan dengan cara mempercepat pencatatan pendapatan, menunda biaya dan memindahkan biaya untuk periode lain.

## 4. *Income Smoothing*

*Income smoothing* atau perataan laba merupakan salah satu bentuk manajemen laba yang dilakukan dengan cara membuat laba akuntansi relatif konsisten (rata atau *smooth*) dari periode ke periode. Dalam hal ini pihak manajemen dengan sengaja menurunkan atau

meningkatkan laba untuk mengurangi gejala dalam pelaporan laba, sehingga perusahaan terlihat stabil atau tidak berisiko tinggi.

Teknik manajemen laba menurut Setiawati dan Na'im (2000) dalam Ningsaptiti (2010) dapat dilakukan dengan tiga teknik, yaitu:

1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi.

Cara manajemen mempengaruhi laba melalui *judgement* (perkiraan) terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi biaya garansi, amortisasi aktiva tak berwujud, dan lain-lain.

2. Mengubah metode akuntansi.

Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi. Contoh: merubah depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus.

3. Menggeser periode biaya atau pendapatan.

Contoh rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain: mempercepat/menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya, menunda/mempercepat pengiriman produk ke pelanggan, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tak dipakai.

Levitt (1998) dalam Stice et al (2004:430-434) mengemukakan lima teknik manajemen laba sebagai berikut:

1. Biaya mandi besar (*big bath charges*)

Biaya mandi besar ini merupakan metode yang sama dengan *taking bath* yang dikemukakan sebelumnya.

2. Akuntansi Akuisisi yang Kreatif

Saat suatu perusahaan melakukan akuisisi terhadap perusahaan lain, hal penting yang harus dilakukan adalah mengalokasikan harga penjualan total ke tiap-tiap aktiva

perusahaan yang diakuisisi. Praktik umum yang sering dilakukan adalah mengalokasikan sejumlah besar harga pembelian ke riset dan pengembangan dari proyek yang sedang dilaksanakan. Hasil akhir praktik ini akan sama dengan *taking bath*, yakni sejumlah besar biaya riset dan pengembangan dicatat pada saat tahun akuisisi, dan beban-beban yang dialokasikan ke periode setelahnya akan semakin kecil dari yang seharusnya apabila harga beli dialokasikan sebagai aktiva yang disusutkan.

### 3. Simpanan dalam stoples kue (*cookie jar reserves*)

Tujuan dari simpanan dalam stoples kue adalah untuk berjaga-jaga bila nanti perusahaan menghadapi masa-masa sulit. Cara yang digunakan misalnya mengakui beban atas piutang tak tertagih yang sangat tinggi di tahun ini, saat jumlah laba cukup besar meskipun dengan adanya tambahan beban ini. Hal ini membuat suatu perusahaan memiliki fleksibilitas untuk mengakui beban atas piutang tak tertagih yang lebih rendah di periode-periode berikutnya, ketika angka laba tidak terlalu bersinar.

### 4. Materialitas

Sebuah kesalahan penghitungan dalam laporan keuangan dapat menjadi hal yang dianggap benar dengan alasan materialitas. Pengukuran materialitas yang menggunakan perbandingan seperti 1% dari penjualan, 5% dari pendapatan operasional, dan 10% dari ekuitas dapat dijadikan sebagai penutup kecurangan. Seharusnya, materialitas tidak hanya dilihat dari perbedaan angka, tetapi juga harus mengkaji dampak dari perbedaan tersebut.

### 5. Pengakuan pendapatan

Perusahaan-perusahaan baru yang sangat ingin melaporkan hasil operasi pada para pemberi pinjaman atau investor, mengakui pendapatan pada saat kontrak penjualan ditandatangani atau selesai sebagian dan tidak menunggu sampai produk atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak benar-benar telah dikirim atau dikerjakan. Praktik penilaian mendalam dalam proses akrual memberi kemampuan kepada para manajer yang putus asa untuk mempercepat atau menunda pelaporan laba agar sesuai dengan tujuan dan kebutuhan mereka.

## **2.3 Dewan Komisaris**

### **2.3.1 Pengertian Dewan Komisaris**

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG, 2006) menyebutkan bahwa kepengurusan perseroan terbatas di Indonesia menganut sistem dua badan (*two board system*) yaitu dewan komisaris dan direksi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan (*fiduciary responsibility*). Peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk hal ini adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Undang-undang ini menyebutkan bahwa organ perusahaan terdiri dari RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris.

Effendi (2009:9) menjelaskan bahwa direksi (*directors*) berfungsi untuk mengurus perusahaan, sementara dewan komisaris (*board of commissioners*) berfungsi untuk melakukan pengawasan. Selain itu, komisaris independen (*independent commissioner*) berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang (*conterveiling power*) dalam pengambilan keputusan oleh dewan

komisaris. Direksi dan Dewan Komisaris dipilih oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mewakili kepentingan para pemegang saham tersebut.

Menurut Egon Zehnder (2000) dalam FCGI (2003), dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance*, yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Komisaris bersifat independen, mereka tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan dan diharapkan mampu melaksanakan tugasnya secara objektif (Andayani, 2010).

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) mengatur mengenai tugas dan fungsi komisaris sebagai berikut:

1. Pasal 1 menyatakan kelembagaan dewan komisaris merupakan salah satu organ perseroan selain RUPS dan direksi. Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.
2. Pasal 110 menyatakan bahwa yang dapat menjadi anggota dewan komisaris adalah orang perseroan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatannya pernah:
  - a. Dinyatakan pailit
  - b. Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
  - c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

3. Pasal 114 menyatakan bahwa setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Pasal 80 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 mengenai Pasar Modal mengatur tentang tanggung jawab pemberian informasi yang tidak benar dan menyesatkan. Pasal tersebut menyebutkan komisaris sebagai pihak yang turut bertanggung jawab, bila ikut menandatangani setiap dokumen yang berhubungan dengan penyampaian informasi kepada publik dalam rangka pernyataan pendaftaran. Bagi setiap calon emiten yang akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, PT Bursa Efek Indonesia mewajibkan adanya komisaris independen dalam struktur kepengurusan emiten tersebut.

Peraturan tentang komisaris independen juga tersebut dalam UU PT No. 40 Tahun 2007, pasal 120. Disebutkan bahwa Anggaran Dasar perseroan dapat mengatur adanya satu atau lebih komisaris independen yang pengangkatannya berdasarkan kepada RUPS. Keberadaan komisaris independen diperlukan untuk meningkatkan independensi dewan komisaris terhadap kepentingan pemegang saham mayoritas dan benar-benar menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan lainnya (Muntoro, 2006).

Peraturan No. 1-A dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Tahun 2004, tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, butir III.1.4., mengatur tentang rasio komisaris independen. Butir tersebut menyatakan bahwa jumlah komisaris independen haruslah secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak yang bukan merupakan pemegang saham pengendali, dengan ketentuan bahwa jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

Di Indonesia, peningkatan kebutuhan akan GCG semakin terasa setelah terjadinya krisis multi dimensi pada tahun 1997. Diduga salah satu penyebab terjadinya krisis adalah lemahnya pengawasan yang dilakukan terhadap direksi perusahaan yang seharusnya dilakukan oleh dewan komisaris (Herwidayatmo, 2000 dalam Muntoro, 2006). Berdasarkan kaitannya dengan implementasi GCG di perusahaan, keberadaan komisaris maupun komisaris independen, diharapkan tidak hanya sebagai pelengkap karena dalam diri komisaris melekat tanggung jawab secara hukum (yuridis) (Effendi, 2009).

### **2.3.2 Ukuran Dewan Komisaris dan Manajemen Laba**

Ukuran atau jumlah anggota dewan komisaris beserta ketuanya, haruslah proporsional dengan jumlah anggota dewan direksi. Hal ini dimaksudkan agar peran dewan komisaris dalam mengawasi dan memberikan nasihat kepada dewan direksi dapat terlaksana secara efektif (Muntoro, 2006). Namun, beberapa penelitian menunjukkan pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan memiliki hasil yang beragam. Salah satu argumen menyatakan bahwa dewan komisaris yang berukuran kecil akan lebih efektif dalam melakukan tindakan pengawasan dibandingkan dewan komisaris berukuran besar. Ukuran dewan komisaris yang besar dianggap kurang efektif dalam menjalankan fungsinya karena sulit dalam komunikasi, koordinasi serta pembuatan keputusan (Jensen,1993).

Hal tersebut dapat dijelaskan dengan adanya *agency problems* (masalah keagenan), yaitu dengan makin banyaknya anggota dewan komisaris maka badan ini akan mengalami kesulitan dalam menjalankan perannya, diantaranya kesulitan dalam berkomunikasi dan mengkoordinir kerja dari masing-masing anggota dewan itu sendiri, kesulitan dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan dari manajemen, serta kesulitan dalam mengambil keputusan yang berguna bagi perusahaan (Jensen 1993). Adanya kesulitan dalam perusahaan dengan anggota

dewan komisaris yang banyak ini membuat sulitnya menjalankan tugas pengawasan terhadap manajemen perusahaan yang nantinya berdampak pula pada kinerja perusahaan yang semakin menurun (Yermack, 1996).

Terkait manajemen laba, Nasution dan Setiawan (2007) menemukan hubungan yang positif signifikan antara ukuran dewan komisaris dengan manajemen laba. Artinya, perusahaan yang memiliki dewan komisaris dalam jumlah banyak maka tindak manajemen laba yang dilakukan perusahaan juga semakin banyak. Kondisi tersebut dapat disebabkan karena sulitnya koordinasi antar anggota dewan tersebut dan hal ini menghambat proses pengawasan yang harusnya menjadi tanggung jawab dewan komisaris.

Chtourou et al (2001) menemukan hasil yang berbeda. Penelitian mereka mengungkapkan bahwa semakin sedikit jumlah anggota dewan komisaris, maka perannya dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen akan semakin efektif dan meminimalkan tindak manajemen laba. Namun dalam penelitian mereka hal ini hanya terjadi pada kasus dimana manajemen laba dilakukan dengan penurunan laba (*income decreasing*), sedang untuk kasus sebaliknya (*income increasing earnings management*) hasilnya tidak signifikan. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Zhou dan Chen (2004) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris di bank komersial tidak berpengaruh terhadap *earnings management* yang diukur dengan menggunakan *loan loss provisions*. Zhou dan Chen (2004) juga membagi kriteria manajemen laba tinggi dan rendah dan mengujinya secara terpisah. Pengujian tersebut menyimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris secara signifikan berpengaruh dalam menghalangi tindak manajemen laba untuk perusahaan yang melakukan manajemen laba tinggi. Xie, Davidson, dan Dadalt (2003) juga menyatakan hal yang sama yaitu makin banyak dewan komisaris maka pembatasan atas tindak manajemen laba dapat dilakukan lebih efektif.

Dari beberapa penelitian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub>: Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba

### **2.3.3 Komposisi komisaris independen dan Manajemen Laba**

Penelitian mengenai keberadaan dewan komisaris telah dilakukan diantaranya Chtourou *et al.* (2001) yang menemukan bahwa *earnings management* secara signifikan berhubungan dengan dewan komisaris. Hasil penelitian menunjukkan praktek manajemen laba dengan teknik *income increasing* rendah pada perusahaan yang memiliki dewan komisaris yang telah berpengalaman pada perusahaan tersebut dan juga pada perusahaan lain.

Xie, Davidson, dan Dadalt (2003) meneliti peran dewan komisaris dengan latar belakang bidang keuangan dalam mencegah manajemen laba. Dari penelitian ini diketahui makin sering dewan komisaris bertemu maka akrual kelolaan perusahaan makin kecil. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien negatif yang signifikan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa persentase dewan komisaris dari luar perusahaan yang independen berpengaruh negatif secara signifikan terhadap akrual kelolaan.

Ujiyantho dan Pramuka (2007) menguji pengaruh proporsi dewan komisaris terhadap manajemen laba di perusahaan manufaktur yang *go public* tahun 2002-2004. Hasil yang didapatkannya adalah dewan komisaris ternyata belum mampu mengurangi tindak manajemen laba di perusahaan yang disebabkan oleh penempatan atau penambahan anggota komisaris independen dimungkinkan hanya sekedar memenuhi ketentuan formal, sementara pemegang saham mayoritas (pengendali/*founders*) masih memegang peranan penting sehingga kinerja dewan tidak meningkat bahkan turun.

Penelitian Ujiyantho dan Pramuka (2007) hampir sama hasilnya dengan penelitian Veronica dan Utama (2005) yang meneliti pengaruh proporsi komisaris independen terhadap

manajemen laba. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen tidak berkorelasi secara signifikan terhadap manajemen laba.

Dari beberapa penelitian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H<sub>2</sub> :Komposisi komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba.

## **2.4 Komite Audit dan Manajemen Laba**

Kanaka Puradiredja, dkk (2006:4) dalam Effendi (2009:25) mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan.

Kehadiran komite audit di perusahaan publik di Indonesia telah mendapat respons yang cukup positif dari berbagai pihak, antara lain pemerintah, Bapepam-LK, Bursa Efek Indonesia, para investor, profesi penasihat hukum (advokat) profesi akuntan, serta perusahaan penilai independen (*independent appraisal company*) (Effendi, 2009:32). Surat Edaran dari Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. SE-008/BEJ/12-2001 Tanggal 7 Desember 2001 perihal keanggotaan komite audit menyebutkan bahwa:

1. Komite audit sekurang-kurangnya terdiri atas tiga orang, termasuk ketua komite audit.
2. Anggota komite audit yang berasal dari komisaris maksimum hanya satu orang, yang merupakan komisaris independen dan sekaligus menjabat sebagai ketua komite audit.
3. Anggota komite audit hanya berasal dari pihak eksternal yang independen, yaitu pihak di luar perusahaan tercatat yang bukan merupakan komisaris, direksi, maupun

karyawan dari perusahaan tercatat tersebut serta tidak memiliki hubungan usaha dan hubungan afiliasi dengan perusahaan tercatat maupun dengan komisaris, direksi, serta pemegang saham utamanya.

Seperti diatur dalam Kep-29/PM/2004 yang merupakan peraturan yang mewajibkan perusahaan membentuk komite audit, tugas komite audit antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.
4. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi.
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten.
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan.

Penelitian Klein (2000) mengenai komite audit memberikan bukti secara empiris bahwa perusahaan yang membentuk komite audit independen melaporkan laba dengan kandungan akruaI diskresional yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang tidak membentuk komite audit independen. Carcello et al. (2006) menyelidiki hubungan antara keahlian komite audit di bidang keuangan dan manajemen laba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keahlian komite audit independen di bidang keuangan terbukti efektif mengurangi manajemen laba.

Berbeda dengan penelitian di Indonesia, Wedari (2004) yang menguji pengaruh komite audit terhadap praktik manajemen laba menemukan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Artinya, komite audit belum berhasil mengurangi manajemen laba. Siregar dan Utama (2005) juga menemukan bahwa keberadaan komite audit tidak terbukti mempengaruhi besaran pengelolaan laba secara signifikan. Hal ini mungkin terjadi karena pengangkatan komite audit oleh perusahaan hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja tetapi tidak dimaksudkan untuk menegakkan *good corporate governance* di perusahaan (Ningsaptiti, 2010).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

H<sub>3</sub> : Komposisi komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba.

## **2.5 Ukuran Perusahaan dan Manajemen Laba**

Perusahaan adalah sebuah organisasi atau lembaga yang mengubah keahlian dan material (sumber ekonomi) menjadi barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan para pembeli, serta diharapkan akan memperoleh laba bagi para pemilik (Mpaata dan Agus S, 1997 dalam Aswiatri, 2010). Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Terdapat berbagai proksi yang biasanya digunakan untuk mewakili ukuran perusahaan, yaitu jumlah karyawan, total aset, jumlah penjualan, dan kapitalisasi pasar. Semakin besar aset maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ia dikenal dalam masyarakat.

Perusahaan yang berukuran besar biasanya memiliki peran sebagai pemegang kepentingan yang lebih luas. Hal ini membuat berbagai kebijakan perusahaan besar akan

memberikan dampak yang besar terhadap kepentingan publik dibandingkan perusahaan kecil (Ningsaptiti, 2010). Perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan, sehingga berdampak perusahaan tersebut melaporkan kondisinya lebih akurat (Nasution dan Setiawan, 2007).

Penelitian Chtourou et al (2001) menemukan bahwa ukuran perusahaan di Amerika Serikat berpengaruh negatif terhadap manajemen laba pada semua kelompok pengujian. Perusahaan yang lebih besar berkesempatan lebih kecil dalam melakukan manajemen laba dibandingkan perusahaan kecil. Pengujian Veronica dan Utama (2005) melaporkan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap besaran manajemen laba adalah ukuran perusahaan. Makin besar ukuran perusahaan, makin kecil tindak manajemen labanya.

Dari penelitian tersebut, maka hipotesis selanjutnya adalah:

H<sub>4</sub>: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba

## **2.6 Studi Penelitian Terdahulu**

Nasution dan Setiawan (2007) melakukan penelitian tentang pengaruh komposisi komisaris independen, ukuran dewan komisaris, keberadaan komite audit, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Hasil yang ditemukan pada penelitian ini adalah komposisi komisaris independen berpengaruh negative terhadap manajemen laba. Ini menandakan bahwa mekanisme corporate governance yang diajukan melalui keberadaan pihak independen dalam dewan komisaris mampu mengurangi tindak manajemen laba yang terjadi dalam perusahaan.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Ujiyantho dan Pramuka (2007). Penelitian ini menggunakan empat variable independen yaitu: kepemilikan institusional, kepemilikan

manajerial, proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris, dan manajemen laba sebagai variable dependennya. Ujiyantho dan Pramuka mendapatkan kesimpulan bahwa:

1. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.
2. Kepemilikan manajerial berpengaruh negative signifikan terhadap manajemen laba.
3. Proporsi komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba.
4. Jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.
5. Keempat factor di atas secara bersama-sama teruji dengan tingkat pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba.
6. Manajemen laba (*discretionary accruals*) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan (*cash flow return on asset*).

Veronica dan Utama (2005) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktek *Corporate Governance* Terhadap Pengelolaan Laba. Kesimpulan dari penelitian ini adalah variabel yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap besaran pengelolaan laba adalah ukuran perusahaan dan kepemilikan keluarga. Dimana semakin besar ukuran perusahaan semakin kecil pengelolaan labanya dan rata-rata pengelolaan laba pada perusahaan dengan kepemilikan keluarga tinggi dan bukan perusahaan konglomerasi lebih tinggi daripada rata-rata pengelolaan laba pada perusahaan lain. Variabel kepemilikan institusional dan ketiga variabel praktek corporate governance tidak terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap besaran pengelolaan laba yang dilakukan perusahaan.

Sari (2009) juga melakukan penelitian tentang mekanisme internal corporate governance, manajemen laba, dan kinerja keuangan pada perusahaan *Go Public* di Indonesia. Kesimpulan yang didapatkan Sari (2009) adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi komisaris independen, dan ukuran dewan komisaris memiliki hubungan yang positif terhadap manajemen laba. Namun, hanya kepemilikan institusional yang berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen.

## **2.7 Kerangka pemikiran**

Tindakan *earnings management* telah memunculkan beberapa kasus skandal pelaporan akuntansi yang secara luas diketahui, antara lain Enron, Merck, World Com dan mayoritas perusahaan lain di Amerika Serikat (Cornett et al, 2006). Kasus skandal ini terbukti melibatkan manajemen di tingkat tertinggi (Muntoro, 2006). Kasus manajemen laba juga terjadi di Indonesia, diantaranya: PT Kimia Farma Tbk. (2002), PT Indofarma Tbk. (2004), PT Indosat (2003 & 2004), dan PT Kereta Api (2005).

Timbulnya *earning management* ini dapat dijelaskan dengan teori keagenan. Teori keagenan menjelaskan hubungan antara manajer (*agent*) dan pemilik (*principal*). Dalam teori keagenan (*agency theory*), hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Masalah dapat timbul ketika *agent* ingin mengoptimalkan keuntungannya sendiri tanpa mempertimbangkan akibat tindakannya terhadap *principal*.

Terjadinya manajemen laba diakibatkan juga oleh adanya asimetri informasi atau kesenjangan informasi antara manajer dan pemilik (Richardson, 1998). Manajer sebagai

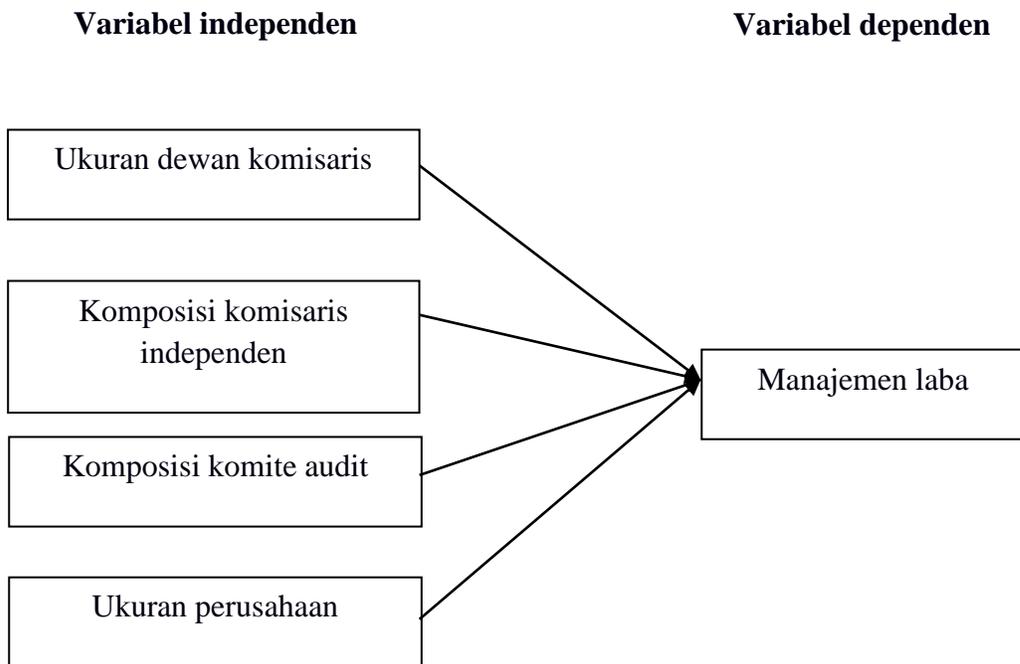
pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Akan tetapi informasi yang disampaikan terkadang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya (Haris, 2004 dalam Ujijantho dan Pramuka, 2007).

Salah satu solusi yang diusung untuk meminimalisasi tindakan manajemen laba di perusahaan adalah dengan menerapkan *good corporate governance* (GCG). GCG menawarkan jaminan perlindungan yang efektif terhadap investor dan kreditur, sehingga para investor dan kreditur melakukan investasi yang tepat dan mendapatkan laba atau *return* yang tinggi.

Adapun inti dari GCG menurut Egon Zehnder (2000) dalam FCGI (2003) adalah dewan komisaris yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Pengawasan yang dilakukan dewan komisaris terhadap manajemen diharapkan dapat meminimalkan tindak kecurangan oleh manajemen seperti tindakan manajemen laba.

Penelitian tentang dewan komisaris dan hubungannya dengan manajemen laba pernah dilakukan diantaranya oleh Nasution dan Setiawan (2007) dan Ujijantho dan Pramuka (2007). Namun, kedua penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Nasution dan Setiawan (2007) menemukan adanya hubungan yang positif antara manajemen laba dan ukuran dewan komisaris. Semakin kecil ukuran dewan komisaris, maka semakin efektif peran dan fungsinya. Sehingga semakin kecil pula kemungkinan terjadinya manajemen laba. Sedangkan Ujijantho dan Pramuka (2007) memperoleh hasil bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



## **2.8 Rumusan Hipotesis**

### **a. Ukuran dewan komisaris**

H<sub>1</sub>: Ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba

### **b. Komposisi komisaris independen**

H<sub>2</sub>: Komposisi komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba

**c. Komposisi komite audit**

H<sub>3</sub>: Komposisi komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba

**d. Ukuran Perusahaan**

H<sub>4</sub> : Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba